

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dikatakan berhasil ketika memiliki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia yang baik. Kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari sekolah yang memiliki tata kelola yang baik (*Good Governance*). Keberhasilan setiap sekolah tergantung pada cara pengelolaannya (*Good Governance*). Kebutuhan akan manajemen sekolah yang efisien telah lebih menekankan pada sifat serta kualitas pekerjaan kepala sebagai pemimpin dalam tim pendidik yang profesional dan sebagai pemimpin dalam hal penggunaan sumber daya yang efektif seperti manusia, keuangan, teknologi, dan material lainnya.

United Nations Development Programme dan *World Bank* (UNDP,2011) mendefinisikan *Governance* sebagai suatu proses pembuatan atau pengimplementasian kebijakan publik yang melibatkan interaksi sosial, politik, ekonomi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Dimana suatu instansi pemerintah dapat dikatakan telah mencapai *Good Governance* jika telah memiliki karakteristik (1) *Participatory* (2) *Consensus Oriented* (3) *Accountable* (4) *Transparant* (5) *Responsive* (6) *Effective and Efficient* (7) *Equitable* (UNDP, 2011).

Good School Governance merupakan adopsi dari *Good University Governance* yang merupakan adopsi dari *Good Governance*.

Sekolah yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, dan tidak juga karena fasilitas dalam instansi tersebut. Sekolah yang ber tata kelola yang baik harus dibentuk dan direncanakan dengan baik serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk tata kelola dengan pengendalian internal yang baik. Dalam upaya mewujudkan tata kelola sekolah yang baik setiap institusi pendidikan memerlukan peran pengendali intern yang bertujuan meneliti dan mengevaluasi suatu program yang ada dalam instansi tersebut.

Pengendali intern merupakan salah satu satuan kerja yang menunjang terwujudnya tata kelola yang baik yang pada saat ini berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan sekolah secara efektif dan efisien. Selain itu pengendali internal merupakan unsur yang efektif yang menjamin operasi perusahaan menjadi efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan aturan internal perusahaan dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat terciptanya akuntabilitas (Gusnardi, 2008).

Sistem Pengendalian Internal pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang baik adalah sistem yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, pengendalian internal secara relatif dapat membantu pencapaian target baik peningkatan kinerja perusahaan dan target keuntungan serta kepatuhan terhadap UU dan peraturan lainnya maupun terhindar dari kerusakan dan konsekuensi buruk lainnya (Tim studi penerapan pengendalian intern pada emiten dan perusahaan publik 2006:20 dalam Anastasya 2012)

Kepala sekolah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menjalankan program-program sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh tidak berkompeten dalam mengemban setiap tugas-tugasnya dan memiliki visi serta integritas. Sekolah juga akan lebih

baik apabila seluruh elemen pengendali yang ada mampu memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada warga sekolah dan lingkungan sekitar. Untuk pengendalian internal juga dibutuhkan kerjasama antara kepala sekolah, komite sekolah, staf pegawai, dan guru.

Kepala sekolah, bahkan sebagai kepala eksekutif sekolah tidak bertindak sendiri atas wewenangnya sendiri, tetapi melaksanakan tugasnya dalam konteks hukum, peraturan, keuangan, industri administratif dan arahan yang berasal dari pemerintah yang sebagai wakilnya dari orang-orang yang memiliki otoritas asli untuk menentukan jenis pendidikan yang harus disediakan suatu negara untuk warganya. Sekolah baik lembaga publik maupun swasta, juga memiliki sejumlah pemangku kepentingan dalam kegiatan mereka. Karena tata kelola mereka dilakukan melalui koalisi kepentingan yang bekerja bersama, tetapi melakukan fungsi yang berbeda, semuanya bertujuan untuk memungkinkan setiap sekolah untuk beroperasi dan untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Kepala Sekolah adalah pengendali yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan sehari-hari sekolah, harus tahu lembaga, kelompok dan individu apa yang merupakan koalisi kepentingan ini. Namun masalah yang terjadi saat ini, pemimpin di sekolah tersebut banyak yang lepas tanggung jawab sehingga banyak ditemukan tenaga pendidik yang tidak disiplin dalam melakukan tugas-tugas nya seperti kasus pada beberapa lembaga pendidikan seringkali berhadapan dengan masalah dalam pencapaian tujuan organisasi seperti : pekerjaan yang melewati batas waktu, mengurangi batas waktu kerja, mogok kerja, bahkan terikat kasus korupsi dan hal lainnya yang merugikan berbagai pihak. Ingin mewujudkan tata kelola sekolah yang baik, perlu komitmen yang tinggi, tata kelola sekolah yang baik yaitu apabila pengendalian internal nya dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki integritas yang tinggi. Sebab kepala sekolah menjadi penentu kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Apabila kualitas

pendidikan di sekolah tidak maksimal akan berdampak pada rendahnya tata kelola yang ada dalam sekolah tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi tata kelola sekolah yang baik (*good school governance*) yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Saat ini masalah yang sedang disorot oleh khalayak publik adalah masalah rendahnya kualitas SDM guru karena mengingat peran guru sangatlah diharapkan keikutsertaannya untuk meningkatkan tata kelola sekolah yang baik.

Untuk itu, pembinaan kompetensi sumber daya manusia terhadap guru perlu menjadi perhatian khusus, padahal pemerintah memberikan berbagai bantuan ke sekolah atau sebut saja tunjangan guru, namun kenyataan yang masih terjadi tidak berbanding lurus dengan kualitas sekolah itu sendiri.

Maraknya tenaga pendidik yang mendidik siswa namun tidak kompeten di dalam bidangnya, ada banyak guru-guru yang mengemban beberapa mata pelajaran untuk diajarkan kepada siswa dan mengakibatkan tidak adanya pemisahan tugas dalam sekolah tersebut, minimnya kompetensi pedagogik guru dalam menguasai dan mengembangkan materi bahan pelajaran, tidak melakukan evaluasi serta masih rendahnya motivasi kerja pada sebagian guru yang menyebabkan menurunnya kinerja guru. Tantangan bagi sekolah saat ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten bagi guru dan siswa namun pada penelitian ini lebih menekankan kepada guru.

Saat ini, guru yang memiliki kompetensi diatas rata-rata atau lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tak lebih dari 30 persen. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru dalam upaya membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. Dapat diakui bahwa banyak guru–guru yang kompeten namun jauh lebih dominan guru-guru yang tak kompeten (Penilaian Dudung kepada PR Online Jakarta 22 Agustus 2019) dikarenakan rendahnya minat belajar, membaca, menulis dan menghasilkan karya media pembelajaran dan malas mengikuti organisasi profesi sehingga tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Supriono) menyatakan Kemendikbud terus mengupayakan berbagai program yang dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan.

Keberadaan guru yang kompeten dan profesional merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi guna meningkatkan tata kelola sekolah yang baik agar dapat bersaing dengan negara–negara maju lainnya. Hampir seluruh bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong terciptanya guru yang kompeten dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 point b mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berdasarkan hal ini, guru dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik..

Faktor lainnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga masih belum terealisasi pada sekolah, banyak penelitian yang mengatakan bahwa pengaruh IT terhadap profesi guru sangat berpengaruh terhadap tata kelola sekolah yang dimana ditemukan saat guru mentransfer ilmu kepada peserta didik belum berjalan maksimal. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya kompetensi dalam memanfaatkan IT.

Dan budaya pendidikan akan selalu berkembang setiap zaman nya, banyak ditemukan guru tidak mampu menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah seperti proyektor/infocus, menggunakan jejaring sosial, menggunakan TV Edukasi, e-learning karena ketidaktahuan guru dalam menggunakannya mengakibatkan sistem ajar mengajar menjadi monoton dan membosankan seperti penggunaan papan tulis dan kapur tulis masih mendominasi dalam setiap aktivitas belajar mengajar.

Dalam pembelajaran era modren sekarang ini, guru dituntut untuk mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan dalam pola pembelajaran diperlukan untuk melakukan pembaharuan dalam pembelajaran konvensional yang kurang relevan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan media IT dalam bidang pendidikan, dapat menunjang pembelajaran yang kini merupakan keharusan, bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan penguasaan IT bagi guru maupun siswa sebagai bekal hidup di era teknologi yang terus berubah dan berkembang.

Tata kelola sekolah negeri dan swasta tentu berbeda, mulai dari segi fasilitas dan kompetensi SDM nya, pengendalian internal dan teknologi. Dengan biaya yang tergolong standar dari pemerintah, sekolah negeri masih kalah jika dibandingkan dengan swasta yang biayanya tidaklah murah. Berdasarkan kompetensi SDM nya, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah siswa yang belajar di sekolah swasta lebih sedikit dibandingkan dengan negeri.

Jumlah siswa berpengaruh signifikan terhadap perhatian guru, di sekolah negeri guru lebih cenderung memperhatikan siswa yang menonjol. Pola mengajar guru di sekolah negeri cenderung tidak memiliki inovasi dalam mengajar, format pengajarannya satu arah dengan cara menghafal textbook, memahami materi dengan mendengarkan guru sehingga murid sekolah negeri susah dalam berargumentasi (Sanggedi dalam Gozali,2011) sedangkan murid swasta banyak melakukan presentasi di depan kelas, adu argumentasi, sehingga swasta lebih cenderung pandai dalam mengungkapkan pendapatnya (Sangdedi,2010).

Dari segi kurikulum, sekolah negeri mau tidak mau harus menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah distandarisasi oleh Depdiknas, sedangkan sekolah swasta umumnya menggunakan kurikulum internasional sebagaie pedoman penyelenggaraan pendidikannya.

Setiap sekolah diharapkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik, kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni dan penguasaan teknologi informasi yang

dapat mengikuti tren pendidikan yang lebih maju agar pendidikan disekolah tersebut dapat menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu mengetahui tentang penggunaan teknologi yang ada .

Maka dari berbagai faktor yang terdapat diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ataupun survei empiris tentang seberapa besar kah Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Tata Kelola Sekolah yang baik (*Good School Governance*) pada SMP Negeri yang ada di Kota Medan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengendalian internal yang belum kompeten dalam mengendalikan program-program yang ada dalam suatu sekolah.
2. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang kompeten pada sekolah-sekolah sehingga mengurangi kualitas tata kelola.
3. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia dalam sekolah yang berpengaruh terhadap tata kelola sekolah.
4. Tata kelola yang masih harus banyak dibenahi dalam sekolah

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka perlu adanya batasan masalah demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan itu peneliti membatasi hanya pada Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap *Good School Governance* (Studi Empris pada SMP Negeri di kota Medan).

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan?
4. Apakah sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh simultan terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di Kota Medan?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan.

2. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan.
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan.
4. Mengetahui pengaruh simultan antara sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap *good school governance* pada SMP Negeri di kota Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap *good school governance* . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang serta memberikan informasi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi tata kelola sekolah yang baik (*good school governance*).
2. Bagi Akademis
Hasil penelitian ini bagi para akademis adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti yang berminat pada permasalahan yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan memperketat tata kelola yang ada di setiap sekolah agar menuju kualitas sekolah yang baik.

